



PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

Mizael Demak Sitohang^{1*}, Silvia Annur Hasibuan², Epelima Sinaga³, Monika Flora Manik⁴,
Rejosu Vanhot Sianturi⁵, Agnes Dea Lita Br Sitepu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan

Email: mizaelsitohang11@gmail.com¹, silvihasibuan2021@gmail.com², epelimasinaga@gmail.com³,
monikamanik1510@gmail.com⁴, rejosusianturi@gmail.com⁵, agnesdealita20@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the impact of poverty levels and income inequality on the Human Development Index (HDI) in ten districts/cities in North Sumatra Province during the 2019–2023 period. This study uses a quantitative approach with panel data analysis through the Fixed Effect Model (FEM), using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The results show that poverty levels have a significant negative impact on the HDI, where increasing poverty rates reduce people's access to education, health services, and a decent standard of living. Income inequality, as measured by the Gini Ratio, also has a significant negative impact on the HDI, due to uneven economic growth distribution. Simultaneously, these two variables are proven to have a significant impact, explaining most of the variation in the HDI between study areas. These findings confirm that poverty reduction and equitable income distribution are important priorities in improving the quality of inclusive human development in North Sumatra.

Keywords: Poverty Level, Income Inequality, Human Development Index

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel melalui Fixed Effect Model (FEM), menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, di mana peningkatan angka kemiskinan menurunkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio juga memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, karena pertumbuhan ekonomi tidak merata dalam distribusinya. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan dengan kemampuan menjelaskan sebagian besar variasi IPM antarwilayah penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan prioritas penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang inklusif di Sumatera Utara.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia

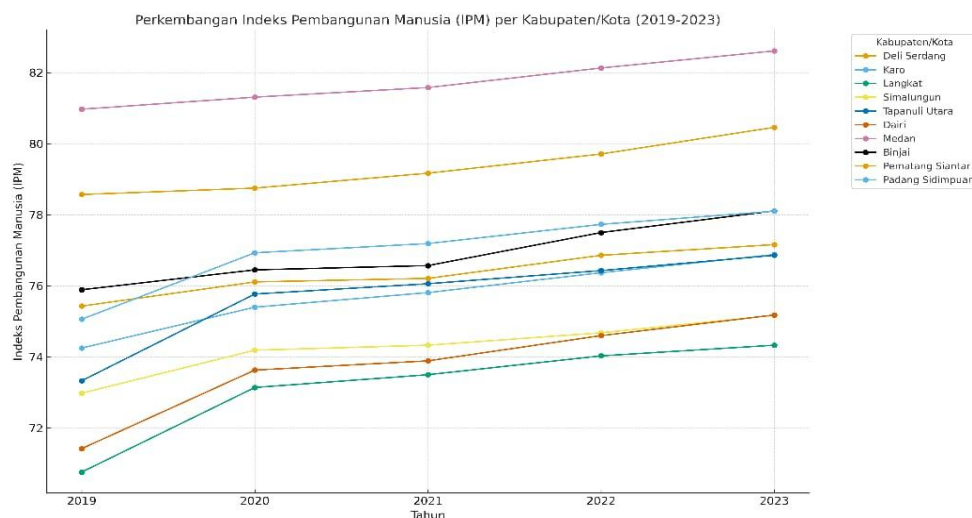
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan memiliki standar hidup yang layak. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai upaya meningkatkan peluang setiap orang untuk hidup layak melalui peningkatan kapasitas dasar, daya beli, pendidikan, dan kesehatan yang adil (Tjodi et al., 2019).

Untuk mengevaluasi kualitas pembangunan manusia, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dimanfaatkan untuk menelaah

perkembangan manusia dengan menggabungkan tiga aspek pokok, yakni kesehatan dan usia harapan hidup, tingkat pendidikan, serta kualitas kehidupan yang layak (Khairunnisa et al., 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketiga dimensi tersebut dengan empat indikator, yakni: (1) usia harapan hidup saat lahir sebagai representasi dari dimensi kesehatan; (2) rata-rata lama sekolah (RLS); (3) harapan lama sekolah (HLS); dan (4) pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan sebagai cerminan taraf hidup layak.

IPM pada dasarnya menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan sebagai bagian dari hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Wijaya, 2021). Capaian IPM di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota. Beberapa daerah telah mencapai IPM yang tinggi, sementara daerah lain masih berada pada kategori sedang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Utara belum sepenuhnya merata dan bisa menghambat keunggulan kompetitif penduduk di masa yang akan datang (BPS Sumut, 2023).



Gambar 1. Grafik IPM 10 Kabupaten di Sumatera Utara

Perbedaan capaian IPM antar daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat mengalami berbagai kekurangan, sehingga tidak mampu memperoleh kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, ataupun kebutuhan pokok yang cukup (Ariwuni & Kartika, 2019). Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa kemiskinan membatasi kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai, yang pada gilirannya mengurangi kualitas hidup mereka. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka semakin rendah capaian pembangunan manusianya.

Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi IPM. Ketimpangan pendapatan diukur melalui Gini Rasio, di mana nilai yang tinggi mengindikasikan tingkat kesenjangan yang besar, sedangkan nilai yang rendah menandakan distribusi penghasilan yang

lebih seimbang (Riani et al., 2021). Ketimpangan yang tinggi menandakan manfaat pembangunan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok lain tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kualitas hidup yang memadai.

Penelitian oleh Matondang (2017) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara, karena kesenjangan sosial yang tinggi membatasi partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh penelitian Riani et al., (2021) yang menyatakan bahwa Gini Rasio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua selama periode 2011–2020. Artinya kenaikan rasio gini justru diikuti dengan peningkatan pada wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula daerah yang tetap menunjukkan peningkatan IPM meskipun tingkat ketimpangan cukup tinggi karena adanya intervensi kebijakan pemerintah.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan IPM belum konsisten di berbagai wilayah. Hal ini menegaskan adanya research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki kondisi sosial-ekonomi beragam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya capaian IPM di beberapa kabupaten di Sumatera Utara tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Atas dasar hal tersebut, peneliti mengangkat topik dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019–2023.” Penelitian ini diharapkan memberikan temuan empiris terbaru sekaligus berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang adil, inklusif, dan berkesinambungan.

Penelitian ini difokuskan pada 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki variasi capaian IPM dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Adapun kabupaten yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Deli Serdang, Karo, Langkat, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, serta Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, dan Padangsidempuan. Pemilihan Kabupaten/kota tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan dengan IPM di daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi di mana individu tidak mampu merasakan berbagai pilihan dan peluang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kesulitan dalam mencapai kesehatan, hidup dengan standar yang pantas, meraih kebebasan, mempertahankan harga diri, serta mendapatkan penghormatan yang setara dengan orang lain (Saputra, 2016). Kemiskinan ialah salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena keterbatasan terkait penghasilan yang minim, namun

keadaan kesehatan, pendidikan, dan faktor lainnya. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kapabilitas dasar manusia sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *capability* oleh Amartya Sen, sehingga kemiskinan berarti kurangnya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif, sehat, dan bermartabat (Uskono et al., 2025).

Secara umum, kemiskinan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan (Melliny et al., 2022). Kebutuhan dasar minimum ini dihitung sebagai indikator finansial dalam bentuk uang, yang disebut garis kemiskinan. Individu yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sementara itu, kemiskinan relatif merujuk pada situasi yang diakibatkan oleh imbas kebijakan pembangunan yang belum merambah semua lingkaran masyarakat, yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi yang lebih miskin daripada yang lain. Situasi ini terlihat ketika ada ketidakseimbangan antara berbagai kelompok pendapatan (Riani et al., 2021)

Kemiskinan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup layak merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (Anoraga et al., 2022). Tingkat kemiskinan yang tinggi memberikan konsekuensi negatif terhadap capaian IPM, karena embatasi kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, fasilitas kesehatan, dan standar hidup yang memadai, yang ketiganya menjadi indikator kunci IPM. Rumah tangga miskin cenderung mengalami putus sekolah, kekurangan gizi, keterbatasan layanan kesehatan, serta keterbatasan daya beli yang menghambat kualitas hidup, sehingga secara langsung menurunkan capaian IPM suatu wilayah. Bahkan, kemiskinan dapat menimbulkan efek lintas generasi karena anak-anak yang lahir dari keluarga miskin berisiko mewarisi keterbatasan yang sama, sehingga kemiskinan menjadi perangkap yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan (Putri et al., 2024). Oleh sebab itu, semakin besar angka kemiskinan di suatu wilayah, maka semakin kecil nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai, sehingga pengurangan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Anis Salsabila et al. 2024).

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pendapatan merupakan pencapaian yang didapatkan dalam periode waktu tertentu. Pendapatan yaitu semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Terdapat perbedaan antara pendapatan (*revenue*) dan penghasilan (*income*), di mana pendapatan adalah jumlah penerimaan keseluruhan tanpa memperhitungkan biaya dan beban, sementara Penghasilan merupakan sisa penerimaan setelah dikurangi beban serta biaya (Susi Susanti, 2020). Pendapatan merupakan salah satu indikasi utama kesejahteraan ekonomi yang mencerminkan

kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menjadi salah satu komponen penting dalam pengukuran IPM. Dalam konteks makroekonomi, pendapatan yang meningkat diharapkan mampu memperkuat kemampuan belanja masyarakat, merangsang aktivitas konsumsi, serta memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan suatu wilayah. Apabila pendapatan masyarakat di daerah tersebut rendah, maka perkembangan serta tingkat kesejahteraannya juga cenderung rendah. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli pun ikut naik dan sebagian surplus dari konsumsi biasanya dialokasikan dalam bentuk tabungan atau investasi melalui lembaga keuangan. Hal ini pada akhirnya mendukung kemajuan dalam bidang pendidikan, produksi, dan sektor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan daerah (Ramadhan et al., 2023).

Gini Rasio adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara atau daerah, dengan mengukur hubungan antara total pendapatan dan distribusinya di antara keluarga atau individu (Umamah & Freesca, 2025). Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan secara merata di antara penduduk. Distribusi pendapatan yang timpang akan menimbulkan ketidakadilan sosial karena sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, sementara kelompok berpendapatan rendah sulit meningkatkan kualitas hidupnya. Ketimpangan pendapatan dapat mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, karena hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi berpotensi menimbulkan eksklusi sosial, memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperlambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rahmadi et al., 2019). Oleh karena itu, dalam kajian pembangunan, analisis pendapatan harus selalu diiringi dengan pengukuran ketimpangan untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat menyeluruh dan dapat meningkatkan kualitas hidup secara merata. Masalah pokok dalam distribusi pendapatan ialah adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan.

Fenomena ini muncul akibat adanya perbedaan tingkat produktivitas antarindividu maupun kelompok, di mana sebagian memiliki kemampuan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Menurut Nurlina & Chaira (2017), ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menyejahterakan masyarakat (Pitaloka & Prabowo, 2022). IPM berfungsi mengukur kualitas hidup manusia sekaligus capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa elemen dasar kapasitas hidup (Heppi Syofya, 2024). Gagasan mengenai pembangunan manusia

awalnya diperkenalkan melalui *Human Development Report (HDR)* yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990. Laporan tersebut memfokuskan signifikansi pembangunan yang terfokus akan manusia, di mana manusia dipandang sebagai sasaran utama pembangunan, tidak sekadar sarana untuk mencapai tujuan pembaharuan lainnya. Dalam konteks ini, populasi tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menopang kehidupan (Riani et al., 2021).

Pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada jumlah penduduk, tetapi juga mencakup tiga aspek utama, yakni memperpanjang usia sekaligus menjaga kesehatan, memperoleh pendidikan yang layak, serta kemampuan menjangkau sumber daya yang mendukung tercapainya taraf hidup yang berkualitas. Menurut Efendi et al. (2024) peningkatan IPM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong naiknya produktivitas serta kreativitas manusia. Menurut BPS tahun 2021, manusia adalah sumber kekayaan utama sebuah negara, dan manusia bukanlah alat atau tujuan akhir pembangunan. Nilai Indeks Pendapatan Per Kapita suatu wilayah atau negara mencerminkan seberapa jauh wilayah atau negara tersebut memperoleh tujuan yang ditetapkan, seperti usia impian 85 tahun, akses pendidikan wajib setiap orang, serta tingkat pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat yang mencerminkan kualitas hidup layak. Semakin tinggi angka IPM di suatu daerah, maka semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian menggunakan kuantitatif yang difokuskan pada pengujian hipotesis melalui pendekatan berbaris data yang bisa diukur secara numerik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel, yang dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan dan dampak antarvariabel yang diteliti. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen, laporan, atau publikasi yang telah disusun oleh pihak lain sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2019–2023. Data tersebut mencakup 10 kabupaten di Sumatera Utara, yang difokuskan pada kajian pengaruh tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* sebagai metode utama untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antarvariabel yang diteliti. Untuk memastikan pemilihan model yang tepat, dilakukan serangkaian uji spesifikasi, seperti Uji Chow dan Uji Hausman, yang bertujuan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai dengan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan analisis data panel, penting untuk memilih model estimasi yang tepat agar hasil penelitian valid dan dapat diandalkan. Pilihan model meliputi CEM, FEM, dan REM, sedangkan penentuan model yang paling tepat dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi, yakni Uji *Chow* untuk membandingkan CEM dan FEM, Uji *Hausman* untuk memilih antara FEM dan REM, serta Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan antara CEM dan REM.

Uji Chow

Tabel 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.158752	(9,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.474342	9	0.0000

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai antara CEM dan FEM. Hasil uji pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga model yang direkomendasikan adalah FEM. Untuk memperkuat pemilihan tersebut, selanjutnya dilakukan Uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	53.942818	2	0.0000

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara FEM dan REM. Berdasarkan hasil uji, nilai Probabilitas pada *Cross-section random* diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga bahwa model yang paling sesuai adalah FEM.

Berdasarkan hasil Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, model *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini. Oleh karena kedua uji tersebut

telah menetapkan FEM sebagai model yang sesuai, maka tidak diperlukan lagi pengujian dengan *Lagrange Multiplier* (LM test).

Hasil Estimasi Data Panel

Berdasarkan serangkaian pengujian, *Fixed Effect Model* (FEM) teridentifikasi sebagai model yang paling tepat untuk menganalisis data panel dalam penelitian ini. Adapun hasil estimasi FEM disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Estimate Data Panel

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 09/25/25 Time: 13:02 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	91.36527	3.145853	29.04308	0.0000
X1	-1.443427	0.377876	-3.819842	0.0005
X2	-0.137020	0.058012	-2.361901	0.0234
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.918998	Mean dependent var	76.39100	
Adjusted R-squared	0.895550	S.D. dependent var	2.665490	
S.E. of regression	0.861451	Akaike info criterion	2.745165	
Sum squared resid	28.19969	Schwarz criterion	3.204050	
Log likelihood	-56.62912	Hannan-Quinn criter.	2.919911	
F-statistic	39.19328	Durbin-Watson stat	1.524251	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil estimasi data panel di atas, diperoleh persamaan estimasi sebagai berikut:

$$IPM = 91.36527 - 1.443427 X1 - 0.137020 X2$$

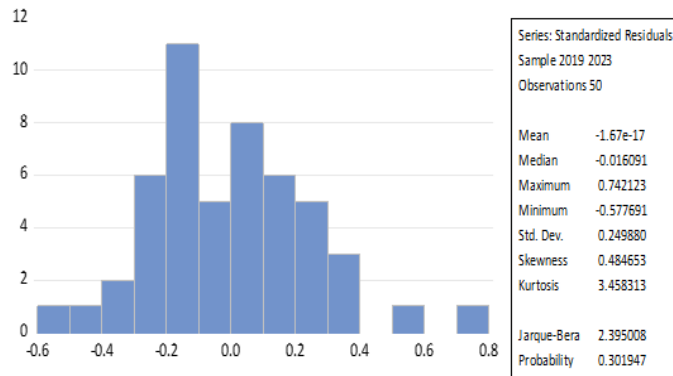
Interpretasi Data:

1. Dari persamaan di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 91.36527, artinya jika variabel independen yang meliputi Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan nilainya sebesar 0 maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 10 kabupaten di Sumatera Utara sebesar 91.36527
2. Koefisien regresi X1 bernilai sebesar -1.443427, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Tingkat Kemiskinan di 10 kabupaten di Sumatera Utara akan menyebabkan penurunan IPM sebesar 1.443427.
3. Koefisien regresi X2 memiliki nilai sebesar -0.137020, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 kabupaten di Sumatera Utara akan menurunkan IPM sebesar 0.137020.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-bera test*.



Gambar 1. Uji Normalitas

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,301947 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengevaluasi adanya hubungan antarvariabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model adalah dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Correlation		
	Tingkat Kemiskinan	Ketimpangan
X1	1,000000	-0,172248
X2	-0,172248	1,000000

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan sebesar $-0,172248$, berada jauh di bawah ambang batas multikolinieritas (0,8). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tidak saling berkorelasi secara signifikan, sehingga apabila digunakan sebagai variabel independen dalam model regresi, model tersebut bebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan varians pada residual dari seluruh data dalam model regresi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah uji *Glejser* dengan menggunakan metode *resabs*. Model yang baik ketika nilai probabilitasnya ($> 0,05$).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.946225	0.906581	-1.043729	0.3032
X1	0.049840	0.108897	0.457678	0.6498
X2	0.029897	0.016718	1.788285	0.0817

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk setiap variabel independen berada di atas 0,05 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji Parsial dilakukan untuk menilai pengaruh setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

Tabel 6 Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
Tingkat Kemiskinan (X1)	-3.819842	0.0005
Ketimpangan (X2)	-2.361901	0.0234

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Prob. untuk X1 sebesar $0,0005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM di Sumatera Utara.

Kemudian dari tabel tersebut juga diperoleh nilai Prob. dari X2 sebesar $0.0234 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi di Sumatera Utara.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menilai pengaruh secara simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7 Uji F

F-statistic	39.19328
Prob (F- statistic)	0,000000

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh nilai Prob F-statistik sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0,05, hal ini mengindikasikan variabel tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 kabupaten di Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini berfungsi untuk menilai seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,918998
Adjusted R-squared	0,895550

Hasil koefisien determinasi pada tabel menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara variabel independen dan dependen. Nilai R-squared sebesar 0,918998 mengindikasikan bahwa hubungan antara keduanya sangat kuat. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,895550 menunjukkan bahwa sekitar 89,55% variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan estimasi menggunakan model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -1,443427 dengan tingkat signifikansi 0,0005 ($< 0,05$), yang mengartikan bahwa setiap peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menyebabkan penurunan IPM sebesar 1,443427%. Temuan ini mendukung teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa miskin menjadi salah satu penghalang utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka kemiskinan yang tinggi membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak, yang merupakan komponen utama dalam penyusunan IPM. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Riani et al., (2021) di Provinsi Papua periode 2011–2020, yang menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian Pitaloka & Prabowo (2022) di 14 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang menegaskan pengaruh negatif dan signifikan kemiskinan terhadap IPM.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) Terhadap IPM

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil estimasi menggunakan model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -0,137020 dengan tingkat signifikansi 0,0234 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0,137020 persen. Temuan tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan, semakin sulit

bagi suatu daerah untuk mencapai pemerataan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan dampak yang merata jika manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umamah & Freesca (2025) di Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa Gini Rasio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) Terhadap IPM

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara bersama-sama, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 ($<0,05$), yang menegaskan bahwa kedua variabel independen secara simultan berkontribusi dalam memengaruhi variasi IPM. Lebih lanjut, nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,918998$) dan Adjusted $R^2 = 0,895550$ mengindikasikan bahwa sekitar 89,55% variasi IPM dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sedangkan sisanya 10,45% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil ini memperlihatkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan merupakan faktor penting yang secara dominan menentukan capaian pembangunan manusia di daerah penelitian. Hasil ini sejalan dengan temuan Riani et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Gini Rasio secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua selama periode 2011–2020.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019–2023. Peningkatan tingkat kemiskinan menyebabkan penurunan capaian IPM yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat menurun, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Begitu pula ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat pemerataan hasil pembangunan manusia sehingga menurunkan nilai IPM wilayah terkait. Secara simultan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mampu menjelaskan 89,5% variasi IPM antar kabupaten. Hal ini menegaskan pentingnya kedua variabel tersebut sebagai faktor utama dalam pembangunan manusia. Dengan demikian, kebijakan pembangunan sebaiknya memprioritaskan pengurangan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Salsabila, Zahra Ramadhani, Goklas Purba, Muhammad Alif Zuanda⁴, Asnidar Asnidar, & Ahmad Ridha. (2024). Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 192–208. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3485>
- Anoraga, P., & Rachmansyah, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kota Semarang. *Jurnal AKTUAL*, 20(1), 212–222. <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i1.157>
- Ariwuni, M., & Kartika, I. (2019). Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Journal EP Unud*, 8(12), 2927–2958.
- Efendi, B., Rusiadi, D. P. N., & Devani. (2024). *Teori indek pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi*.
- Heppi Syofya, S. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis Islam*, 2185.
- Khairunnisa, I., Yusnita, F., Isra, W. S., & Panorama, M. (2023). Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1735–1750. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3557>
- Matondang, E. (2017). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 123–132.
- Melliny, V. D., Purwanti, Y., & Akbar, R. A. (2022). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (J-Mabis)*, 1(1), 1–6.
- Nurlina, & Chaira, T. M. I. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 174–182.
- Pitaloka, M. D., & Prabowo, P. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap IPM 14 Kabupaten Kategori “Sedang” Di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17692>
- Putri, D. T. A., Syahza, A., & Asmit, B. (2024). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendidikan Generasi Penerus Keluarga Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(4), 741–748. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.708>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Ramadhan, A., Rahim, R., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media Group*, 1–55.
- Riani, I. A. P., Sumreskosu, Y., & Purwadi, M. A. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Periode 2011-2020_Ida Ayu Purba Riani, Yohan Sumreskosu, Marsi Adi Purwadi_2021. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(1), 1–17.
- Saputra, W. A. (2016). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa TengaH* (Vol. 2, Issue 1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susi Susanti, H. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 12–24.
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.23428.19.8.2018>
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- Umamah, R., & Fresca, S. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran, Gini Rasio, Dan Jumlah

Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 4(5), 122–134.

Uskono, F. A., Bukifan, F., Seran, A. I., Tanik, V. N., Nahak, B. N., Bria, C. B., & Naicea, M. F. (2025). Dampak Kemiskinan Ekstrem terhadap Kapabilitas Masyarakat di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 4718–4725.

Wijaya, K. (2021). *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.